

MENUJU PENDIDIKAN DASAR YANG LEBIH BAIK TANTANGAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DI KELAS DAN SOLUSI

Three Rahmadona¹, Rusdinal², Hadiyanto³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

¹threerahmadona@student.unp.ac.id, ²rusdinal@fip.unp.ac.id,

³hadiyanto@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

There are challenges faced by teachers as education policy implementers in schools regarding the implementation of learning in their classrooms. This study aims to describe the challenges faced by teachers in improving the quality of learning in the classroom along with their solutions. This research used qualitative research methods with a descriptive design and an interview approach. The results of the study concluded that the challenges faced by teachers in improving the quality of learning in the classroom as policy implementers in schools, along with their solutions, are: 1) The lack of support for teacher professional development, with the solution being that teachers who have undergone training should share their knowledge with other teachers; 2) Difficulties in changing the character of students for the better, with the solution being to seek help from the community and consult professionals; 3) Inadequate facilities and infrastructure such as media and teaching aids, with the solution being to optimize existing resources and technology; 4) The implementation of inclusive education without honing teachers' competencies in handling children with special needs, with the solution being to provide training for educators; and 5) Uncooperative parents, with the solution being to seek help from school leaders or counselors. By knowing these challenges, it is hoped that teachers will be able to overcome the challenges they have faced.

Keywords: *challenge, basic education, solution*

ABSTRAK

Adanya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan di sekolah dalam hal pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sebagai penyelenggara kebijakan di sekolah beserta solusinya, yaitu: 1) Tidak adanya dukungan pengembangan keprofesionalan untuk guru, dengan solusi, guru yang mengikuti pelatihan berbagi ilmu ke pada guru lain; 2) Karakter siswa yang sulit diubah ke arah lebih baik, dengan solusi minta bantuan masyarakat, konsultasi pada profesional; 3) Fasilitas sarana dan prasarana seperti

media dan alat peraga yang kurang terpenuhi, dengan solusi mengoptimalkan sumber daya yang ada dan teknologi; 4) Pelaksanaan pendidikan inklusi tanpa mengasah kompetensi guru dalam menangani anak ABK dengan solusi, memberikan pelatihan tenaga pendidik; 5) Orang tua yang tidak mau diajak bekerja sama dengan solusi, minta bantuan pimpinan atau kepala sekolah bahkan konselor. Mengetahui hal tersebut diharapkan mampu mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi oleh guru.

Kata Kunci: tantangan, pendidikan dasar, solusi

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berbudaya. Indikator untuk menilai kualitas pendidikan adalah prestasi pendidikan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Sriah, 2018). Selain itu, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan pendidikan dasar melalui berbagai program dan kebijakan yang telah diluncurkan.

Pada tahun 2019, Indonesia mencapai angka partisipasi sekolah dasar sebesar 99,84% dan angka melek huruf sebesar 98,66% pada usia 15-24 tahun (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu

agar dapat menerima pendidikan yang memadai, mencegah siswa untuk berhenti sekolah, serta memenuhi kebutuhan sekolah mereka (Siddik et al., 2022).

Idealnya pendidikan dasar yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi apapun; guru yang profesional dan berkualitas dengan status dan gaji yang layak; kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan memenuhi standar internasional; fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan internet; penggunaan teknologi pendidikan efektif untuk meningkatkan proses belajar mengajar sehingga dibutuhkan literasi teknologi. *Technological literacy can be defined as “the ability to use, manage, assess and understand technology.* (Kwon, 2017). Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan dalam

kebijakan pendidikan dasar yang memengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada agar tercipta pendidikan dasar yang lebih baik.

Kendala-kendala pendidikan dasar seperti kurangnya dana Pendidikan, keterbatasan infrastruktur; tantangan mengakses teknologi, kualitas guru yang masih belum merata; kurangnya sumber daya; terhambatnya komunikasi dengan orang tua siswa; dan lain-lain (Maimunah, 2018; Rolos et al., 2022). Jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan tidak efektif (Nainggolan, 2018). Misalnya pada aspek kualitas guru. Pada saat penerapan kurikulum 2013 masih banyak guru yang kurang memahami kurikulum tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Ghunu (2022), "*the teachers' lack of understanding of thematic curriculum and the lack of parental involvement are the main challenge curriculum implementation*". Melaksanakan kebijakan merupakan tugas yang paling sulit karena di lapangan akan muncul berbagai

masalah yang tidak terduga dan tidak pernah dibahas dalam konsep awal (Rahmi, 2019). Masalah lain seperti masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan. Kendala mengakses sekolah yang luar biasa, kurangnya keahlian guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus, dan keterbatasan sarana dan prasarana, semuanya berkontribusi pada masalah ketidakmampuan untuk memberikan pendidikan dan layanan yang layak bagi anak-anak yang kebutuhan khusus (Rizkitama, 2018). Karena alasan inilah, tidak semua anak dengan kondisi yang berbeda dapat menerima pendidikan atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Padahal, adanya pendidikan inklusi sebagai jaminan bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak pendidikan, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi (Munajah et al., 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan dasar adalah kualitas pendidikan yang belum merata dan belum memenuhi standar internasional. Bukti data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia

berada di peringkat 73 dari 100 negara dalam Indeks Pendidikan Kualitas (*Education Quality Index*) yang dilakukan oleh *The Learning Curve* (Pearson, 2018). Selain itu, hasil survei PISA (*Program for International Student Assessment*) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia masih di bawah rata-rata OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains (OECD, 2018). Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang terjadi di sekolah, terutama pada kualitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Sistem pembelajaran efektif dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, proses pembelajaran berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Priyanto dan Dharin (2021), yang menyatakan, "*the learning process has an effect on the development of student creativity*". Guru sebagai pilar utama dalam pembelajaran memainkan peran yang sangat penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, proses pembelajaran, guru dihadapkan pada

tantangan dapat mempengaruhi pembelajaran. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dapat berasal dari berbagai aspek. Untuk memastikan kualitas pendidikan dasar yang baik, dibutuhkan solusi-solusi yang dapat membantu guru dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. penelitian ini akan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sebagai penyelenggara kebijakan di sekolah beserta solusi yang dilakukan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara untuk mengungkap tantangan yang dihadapi guru dalam kebijakan pendidikan di sekolah dan solusinya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data dari literatur atau sumber-sumber lainnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Instrumen lain dapat digunakan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu peneliti dalam menjalankan tugasnya. Contoh instrumen lain dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Peneliti

berperan penting sebagai pengamat dan penjelajah informasi melalui wawancara dengan pedoman secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek atau partisipan penelitian, sehingga peneliti memahami pengalaman mereka terhadap fenomena yang diteliti. Sementara itu, pengumpulan literatur dapat dilakukan dengan mempelajari buku, artikel jurnal, atau sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian dilakukan pada guru di beberapa sekolah dasar dengan sasaran penelitian 5 orang guru. Penelitian dilakukan selama tiga hari secara daring lewat aplikasi *whats app*. Peneliti mewawancarai narasumber lewat pesan pribadi, kemudian membalas lewat pesan suara agar lebih bebas berbicara. Selanjutnya, meneruskan wawancara dengan narasumber sampai mendapatkan informasi secara jelas dan mendalam. Penelitian ini memiliki tiga prosedur (Sugiyono, 2022) yaitu: 1) Pada tahap orientasi, melakukan penelitian literatur terkait dengan rintangan dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan; 2) Pada tahap reduksi, peneliti memfokuskan

penelitian pada pengkajian hambatan yang dihadapi oleh para guru dalam menerapkan kebijakan pendidikan di sekolah, dan juga menyediakan solusinya; 3) Pada tahap seleksi, peneliti melakukan penjelasan yang lebih rinci tentang fokus penelitian. Melalui wawancara, peneliti akan mencari informasi mendalam untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan tiga tahap dalam menganalisis data, yaitu (Moleong, 2022): 1) Tahap reduksi data. Tahapan pengurangan data, penulis menganalisis hasil wawancara dan mencari data penting yang relevan; 2) Penyajian Data. Tahap penyajian data melibatkan penulis dalam menampilkan data dalam format tabel dan deskripsi singkat; 3) Penarikan Kesimpulan. Penulis akan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yang berupa hasil wawancara dengan para guru tentang persepsi mereka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualitas pendidikan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah standar Indeks

Pendidikan Kualitas (*Education Quality Index*) yang diselenggarakan oleh *The Learning Curve* pada tahun 2018. Selain itu, hasil survei PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains di Indonesia masih di bawah rata-rata OECD. Kualitas pendidikan berkaitan langsung dengan bagaimana kualitas pembelajaran yang terselenggara di sekolah dasar. Guru sebagai pelaksana pembelajaran tersebut merasakan langsung bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam penyelenggaraan pendidikan di kelas. Berikut hasil analisis wawancara dengan para guru terkait tantangan-tantangan yang dihadapinya di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya.

Tabel 1 Tantangan Guru Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah

Inisial Guru	Tantangan yang Dihadapi
M.O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan pelatihan, workshop, dan KKG dari sekolah 2. Karakter siswa hanya satu-satu yang bermasalah, siswa mayoritas ditekankan untuk bersikap sopan santun seperti budaya salam kepada guru ketika datang ke sekolah dan pamit hendak pulang, serta

- | | |
|--|--|
| | <p>membaca al-qur'an setiap sebelum belajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kekurangan media dan alat peraga saat belajar, sehingga saya juga meminta bantuan siswa untuk membuat media sendiri, misalnya membuat kubus dari stik. 4. Tidak ada dukungan untuk anak ABK di luar jam pembelajaran, dan tantangan terbesar saya adalah mengajar anak ABK ini. 5. Ada orang tua yang tidak menggunakan HP sehingga saya kesulitan berkomunikasi dengan orang tua di luar jam sekolah. |
|--|--|

- | | |
|-----|---|
| M.R | <ol style="list-style-type: none"> 1. Di sekolah tidak ada kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop, atau seminar untuk pengembangan guru, hanya mengandalkan KKG saja. 2. Pembentukan karakter di kelas saya gagal, karena siswa sangat susah patuh dan dididik. 3. Media dan alat peraga tidak lengkap di sekolah, sangat terbatas. 4. Di kelas saya tidak ada ABK, hanya saja beasiswa untuk siswa kurang mampu belum bisa terlalu menutupi semuanya sehingga ada rapor siswa yang ditahan. 5. Ada orang tua yang sibuk sehingga tidak mau ikut serta dalam pendidikan siswa. |
|-----|---|

- | | |
|---|--|
| M | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan-pelatihan yang ada hanya untuk guru-guru PNS, mungkin terhalang dana. 2. Meskipun pendidikan karakter diterapkan di setiap mata pelajaran, nilai-nilai tersebut hanya bertahan sebentar saja di diri siswa. 3. Fasilitas di sekolah belum cukup. Media-media, alat peraga, dan buku sangat terbatas. Bahkan satu buku |
|---|--|

	<p>bisa untuk tiga orang siswa. Padahal, siswa di kelas saya sangat susah memahami materi pembelajaran sehingga saya sering mengulang-ulang pembelajaran dan materi sulit memakan banyak waktu.</p> <p>4. Tidak ada ABK di kelas saya, untuk siswa kurang mampu akan diberikan beasiswa bahkan guru lain kadang juga memiliki inisiatif untuk membantu. Semua siswa diperlakukan sama.</p> <p>5. Orang tua banyak yang tidak mau tahu, kurang kerja sama dengan guru, dan susah sekali untuk diberitahu.</p>	<p>di sekolah, hanya saja guru-guru tidak ada dilatih untuk anak ABK. Jika menerima siswa ABK seharusnya ada pelatihan untuk guru.</p> <p>5. Tidak semua orang tua bisa diajak bekerja sama, orang tua bisa menyalahkannya, menyalahkan guru, dan tidak mau mengakui jika anak butuh bantuan.</p>
<p>S.H</p>	<p>1. Di kelas saya ada guru utama dan guru pendamping. Saya sebagai guru utama tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, KKG, dan semua itu diberikan kepada guru pendamping saja.</p> <p>2. Di kelas saya semua anaknya kurang motivasi baik dalam pembelajaran maupun perihal karakter yang kurang sopan. Diberitahu sesuatu tidak dilaksanakan, tidak menyapa guru, belajar tidak ada hasil.</p> <p>3. Fasilitas sarana dan prasarana itu mencukupi, tetapi tidak lengkap dan bahkan ada kendala. Misalnya, untuk prasarana di sekolah digunakan secara bersama oleh beberapa jenjang sekolah lain, sehingga jika pembelajaran hendak dilakukan di lapangan atau taman, tetapi saat bersamaan ada juga jenjang pendidikan lain yang juga sedang menggunakan.</p> <p>4. Anak ABK maupun kurang mampu diperlakukan sama</p>	<p>U.K</p> <p>1. Sekolah mendukung guru untuk semua bentuk pelatihan atau pengembangan diri guru asalkan pekerjaan selesai. Hanya saja dari pihak sekolah tidak ada program-program untuk manajemen siswa dengan baik dan kurang menolong guru.</p> <p>2. Karakter siswa sangat parah sekali karena pengaruh lingkungan, dan guru belum menemukan solusi.</p> <p>3. Fasilitas terbatas, seperti hanya ada dua infokus di sekolah, Sumber listrik atau colokan listrik belum di semua kelas, sehingga belum bisa menggunakan infokus.</p> <p>4. Semua ABK atau siswa kurang mampu diperlakukan sama, meskipun tidak ada pelatihan khusus untuk guru dalam menangani siswa ABK</p> <p>5. Kebanyakan siswa tinggal dengan wali, ε banyak wali yan 1000 peduli dan tidak mengawasi anak. Ada juga orang tua yang sulit menerima arahan dari guru.</p>

Dari wawancara di atas tampak beberapa tantangan yang dihadapi oleh beberapa guru ketika menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya. Setiap guru hampir

memiliki tantangan yang sama secara umum. Mulai dari tidak adanya dukungan pelatihan, karakter siswa yang sulit diubah ke arah lebih baik, fasilitas sarana dan prasarana seperti media dan alat peraga yang kurang terpenuhi, pelaksanaan pendidikan inklusi tanpa mengasah kompetensi guru dalam menangani anak ABK, hingga pada tantangan orang tua yang tidak mau diajak bekerja sama, bahkan sulit menerima guru dan hanya menyalahkan guru.

Berdasarkan wawancara dari kelima narasumber, terlihat bahwa sekolah kurang mendukung pembentukan kualitas guru atau peningkatan kompetensi guru lewat pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, dan KKG. Padahal, ketika guru mendapatkan program-program peningkatan kompetensi dan perhatian khusus dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan, maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja guru (Agustina, 2018). Tidak dapat dimungkiri bahwa diperlukan campur tangan dari penguasa atau pemerintah dalam mengelola isu-isu pendidikan yang ada termasuk dalam permasalahan kualitas guru (Harahap, 2021). Pembentukan guru yang berkualitas sangat mempengaruhi

kualitas pembelajaran dan keefektifan suatu sekolah. Makna dari kata "keefektifan" berfokus pada kelangsungan, proses transformasi yang tak berkesudahan karena berupa siklus, dan persaingan di antara sumber daya yang tersedia (Sugiarto, 2020). Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dilakukan melalui berbagai pelatihan atau program pengembangan profesional, sehingga solusi untuk permasalahan jika tidak adanya dukungan dari sekolah mengenai hal tersebut adalah: 1) Sekolah yang memiliki keterbatasan dana dan hanya bisa mengikutkan guru dalam pelatihan dengan jumlah terbatas, bisa mengadakan rapat atau diskusi besar dengan semua guru kemudian guru yang ikut pelatihan dapat membagi ilmunya pada guru-guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan; 2) Guru mencari informasi dan mengikuti seminar-seminar online yang suka beredar di sosial media; 3) Guru secara aktif dan mandiri belajar ilmu-ilmu menjadi pendidik yang baik demi peningkatan kompetensinya lewat internet dan sosial media, karena banyak situs atau akun yang membagikan postingan tentang tips-

tips atau berbagai ilmu pedagogik; 4) Pihak sekolah mengajukan permohonan bantuan biaya kepada dinas, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga sosial untuk membantu pelatihan guru-guru; 5) Guru dapat membeli buku-buku atau meminjam buku di perpustakaan daerah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dirinya.

Selanjutnya, permasalahan pada pembentukan atau pendidikan karakter siswa. Pembentukan karakter sangatlah krusial bagi generasi muda, karena mereka akan menjadi indikator kesuksesan bangsa (Murniviyanti et al., 2022). Sayangnya, pendidikan di Indonesia kurang berhasil dalam membangun karakter siswa. Saat ini, perilaku siswa tidak mencerminkan karakter sebagai siswa yang baik, sehingga pemerintah berupaya memperbaiki proses pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum pembelajaran (Fadhilah, 2021). Namun, tujuan pendidikan belum tercapai dalam mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan seperti bertaqwa, unggul, jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia (Indaryati, 2018). Meskipun dunia pendidikan mampu

melahirkan ahli pengetahuan, namun kurang mengatasi krisis etika. Padahal, pendidikan karakter sangat penting bagi anak-anak di masa mendatang (Wati, 2019). Oleh karena itu, praktik pendidikan perlu ditingkatkan untuk memperkuat aspek karakter setiap individu. Berikut strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam menerapkan pendidikan budi pekerti: 1) Belajar berpikir, di mana kurikulum dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan intelektual mereka dengan memperoleh pengetahuan tentang pikiran (Andiawan, 2022); 2) Belajar merasakan, untuk melatih kemampuan afektif siswa dengan memperkuat kepekaan mereka terhadap keindahan budi pekerti, kehalusan perasaan, empati dan solidaritas sosial, sensitivitas pada daya spiritualitas, keadilan, semangat kebangsaan, dan gotong royong.; 3) Belajar mengembangkan kreativitas dan kecakapan hidup, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengenali dan mengaktualisasikan potensi kecerdasan mereka melalui inovasi dan keterampilan hidup. Bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler keagamaan di sekolah (Hayom Sasami & Sujarwo,

2018). Kenyataannya, penerapan dari teori tidaklah mudah. Terlihat pada hasil wawancara di atas, mayoritas guru mengatakan bahwa pendidikan karakter di kelasnya tidak berhasil, bahkan gagal total meskipun sudah berusaha diterapkan di setiap pembelajaran. Siswa susah patuh dan dididik, jika karakter baik berhasil tertanam, maka hanya bertahan sebentar. Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan mengenai hal tersebut adalah: 1) Menerapkan peraturan wajib membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran guru bisa memberikan pencerahan dengan menceritakan kisah-kisah orang sukses, tokoh inspiratif, atau bahkan orang di sekitar yang bisa ditiru akhlak dan kesuksesannya termasuk para guru di sekolah yang bisa menjadi panutan dan menampilkan contoh baik. Siswa juga dibiasakan salam dengan guru setiap baru datang ke sekolah, dan ketika hendak pamit pulang; 2) Komunikasi yang efektif dengan siswa dan orang tua. Guru bisa berkomunikasi dengan siswa untuk mencari tahu alasan dari sikap siswa tersebut, gunakan bahasa yang santai dan tidak menyerang atau menghakimi siswa sehingga bisa

didiskusikan solusinya bersama. Guru juga bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua mengenai perilaku siswa, dan memberikan laporan secara berkala; 3) Memberikan penghargaan dan sanksi. Guru memberikan penghargaan kepada perilaku baik yang dilakukan oleh siswa agar merasa dihargai dan diperhatikan. Penghargaan tersebut dapat berupa pujian di depan kelas ataupun sekadar ucapan terima kasih. Sanksi yang mendidik dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan siswa berguna agar siswa mampu merenungi dan menyesali perbuatan buruk yang dilakukannya; 4) Sekolah membuat program pembentukan karakter siswa. berupa ekstrakurikuler (keagamaan, pramuka, bakti sosial dan kemanusiaan) dan penerapan aturan serta kontrol yang tegas dari pihak sekolah seperti pembentukan panitia kekerasan, setiap siswa wajib melaporkan siswa lain yang melanggar, dan adanya sanksi jera. 5) Minta bantuan masyarakat. Sekolah bekerja sama dengan lembaga seperti kepolisian dan pemuka masyarakat dalam pembentukan karakter siswa dengan mengadakan penyuluhan, dan membantu memproses serta memberikan sanksi jika permasalahan

siswa sudah ditingkat paling serius, seperti narkoba, perundungan berat, dan pornografi. 6) Konsultasi pada profesional. Sekolah dan orang tua sepakat untuk mencari bantuan dari profesional seperti konselor atau psikolog yang bisa membantu siswa untuk memperbaiki perilakunya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi guru adalah kurang atau terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah seperti media dan alat peraga. Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah dapat mempengaruhi pembelajaran (Utari, 2021). Hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas pembelajaran dan menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Seharusnya pembelajaran mampu mengikuti perkembangan zaman bahkan berbasis teknologi. Namun, masih ada sekolah yang kekurangan dana dan mengalami kendala lainnya sehingga belum bisa menunjang pembelajaran yang dilakukan oleh guru sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa solusi yang ditawarkan, 1) Bila kekurangan dana, sekolah bisa mengajukan permohonan bantuan dana kepada lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, bisa

juga kepada komite demi lancarnya proses pembelajaran; 2) Meminta bantuan dari komunitas sekitar dan melakukan penggalangan dana. Sekolah bisa mengadakan bazar atau acara amal atau meminta partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pembuatan media pembelajaran; 3) Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan teknologi. Sekolah bisa memanfaatkan bahan-bahan alami seperti daun, batu, tanah, kayu, dan semua yang ada di lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai media atau alat peraga, berinovasi dengan bahan-bahan sederhana dan mudah didapat. Teknologi seperti laptop dan ponsel pintar dapat dimanfaatkan untuk mengunduh sumber belajar atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran.

Semua warga negara Indonesia, termasuk Anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan (Supriatini et al., 2019). Tujuan pendidikan inklusif adalah semua anak terlayani dengan baik, untuk dapat mengakses sekolah (Vikalista et al., 2021). Walaupun sekolah memperlakukan anak berkebutuhan khusus dan siswa kurang mampu sama rata seperti siswa lain, tetapi

tidak dapat dimungkiri bahwa tidak adanya pelatihan khusus atau persiapan untuk para guru dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, umumnya untuk anak-anak kurang mampu tersedia beasiswa, dan ada juga guru-guru yang berinisiatif untuk memberikan bantuan. Hanya saja pada pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekolah belum melakukan yang terbaik, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang ABK, kurangnya tenaga pendidik terlatih, dan sebagainya. Untuk itu, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Bantuan dan insentif dari pemerintah dapat diberikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah; 2) Memberikan pelatihan tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten sangat dibutuhkan dalam pendidikan inklusif.

Oleh karena itu, pihak sekolah dan pemerintah menyediakan pelatihan program pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pendidikan inklusif; 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat diberikan edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus; 4) Mengembangkan dana khusus atau mencari dana dari berbagai sumber untuk mendukung pendidikan inklusif. Dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, perlengkapan khusus, atau memberikan insentif untuk tenaga pendidik; 5) Penerapan sanksi dan hukuman. Untuk mengatasi perilaku diskriminatif dari rekan sebaya, sekolah dapat memberikan sanksi dan hukuman bagi siswa yang melakukan tindakan diskriminatif. Hal ini dapat mengurangi perilaku diskriminatif dan meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati menerima perbedaan; 6) Penyesuaian pembelajaran.

Pihak sekolah dapat menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, karena siswa dengan kebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran; 7) Bekerja sama dengan orang tua untuk berkonsultasi dengan psikolog yang akan membantu mengungkap kondisi ABK, memberikan arahan bagaimana pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut. Misalnya adanya guru bayangan di sekolah, yang bertugas selalu mendampingi saat belajar.

Umumnya, orang tua beranggapan bahwa tanggung jawab pendidikan sepenuhnya terletak pada sekolah dan pemerintah. Karena itu, tidak mengherankan jika partisipasi orang tua dalam pendidikan lebih banyak berupa sumbangan dana daripada terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri (Handayani, 2021). Terlihat pada tantangan yang diungkap oleh narasumber di atas, bahwa orang tua banyak yang tidak mau tahu dengan keadaan siswa, kurang kerja sama dengan guru, dan susah sekali untuk diberitahu. Padahal, kerja sama antara guru

dengan orang tua sangat penting terjalin demi terselenggaranya pendidikan yang baik bagi anak (Zakia & Hadiyanto, 2020).

Berikut beberapa solusi mengenai permasalahan tersebut yaitu: 1) Guru berusaha menasihati dan mengedukasi orang tua, hal tersebut lebih baik dilakukan secara langsung. Tidak ada salahnya untuk terus mencoba dan berdiskusi dengan baik. Seorang guru harus mampu menjelaskan secara efektif betapa pentingnya peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran anak di sekolah, serta menjelaskan bahwa kerjasama yang baik antara orang tua dan guru akan memberikan dampak positif pada perkembangan dan prestasi akademik anak.; 2) Guru bisa meminta bantuan kepada orang tua lain untuk memberikan pengertian apabila ada orang tua yang tidak mau mendengarkan guru.; 3) Adakan pertemuan rutin dengan orang tua, pertemuan wajib dilaksanakan saat pengambilan rapor. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan orang tua bisa secara daring dan luring. Ketika pertemuan luring pastikan di saat semua orang tua bisa hadir; 4) Minta bantuan pimpinan atau kepala sekolah bahkan konselor, bila

orang tua sangat sulit untuk dihubungi, diajak bertemu atau kesulitan untuk diajak berkomunikasi; 5) Untuk orang tua yang tidak mau memercayai perkataan guru tentang anaknya, maka bisa mengumpulkan bukti tentang anak tersebut sebelum akhirnya membicarakan kasus kepada orang tuanya. Bisa dengan memfoto atau merekam perbuatan anak. Karena banyak juga orang tua yang tidak mau percaya, tidak mengakui, atau tidak mau menerima kenyataan bila anaknya ternyata memiliki perilaku yang bertentangan dengan apa yang ia harapkan.

Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas lima tantangan yang dihadapi oleh guru, sehingga kemungkinan tantangan lain bisa saja ada. Selain itu, penelitian ini tidak terlepas dari ilmu teori yang dimiliki oleh peneliti, sehingga memiliki keterbatasan pengetahuan. Namun, penelitian ini berimplikasi terhadap perkembangan keilmuan, yaitu adanya solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sebagai penyelenggara kebijakan di sekolah.

D. Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan 1007 pembelajaran di kelas sebagai penyelenggara kebijakan di sekolah beserta solusinya, yaitu: 1) Tidak adanya dukungan pengembangan keprofesionalan untuk guru. Solusinya berupa: guru yang mengikuti pelatihan berbagi ilmu kepada guru lain, guru secara aktif dan mandiri belajar lewat internet dan mengikuti seminar gratis yang beredar, sekolah mengajukan permohonan bantuan biaya, guru belajar lewat buku; 2) Karakter siswa yang sulit diubah ke arah lebih baik. Solusinya: wajib membaca Al-Qur'an sebelum belajar, komunikasi yang efektif dengan siswa dan orang tua, memberikan penghargaan dan sanksi, membuat program pembentukan karakter siswa, minta bantuan masyarakat, konsultasi pada professional; 3) Fasilitas sarana dan prasarana seperti media dan alat peraga yang kurang terpenuhi. Solusinya sekolah mengajukan permohonan dana, penggalangan dana, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan teknologi; 4) Pelaksanaan pendidikan inklusi tanpa mengasah kompetensi guru dalam menangani anak ABK. Solusinya:

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan pelatihan tenaga pendidik, meningkatkan kesadaran, mengembangkan dana khusus, penerapan sanksi dan hukuman, penyesuaian pembelajaran, bekerja sama dengan orang tua untuk berkonsultasi dengan psikolog; 5) Orang tua yang tidak mau diajak bekerja sama. Solusinya adalah guru menasihati dan mengedukasi orang tua, hal tersebut lebih baik dilakukan secara langsung, guru bisa meminta bantuan kepada orang tua lain, adakan pertemuan rutin dengan orang tua, minta bantuan pimpinan atau kepala, mempersiapkan bukti.

Saran peneliti adalah diharapkan kepala sekolah mengadakan rapat dengan semua guru untuk membahas tantangan atau kendala yang dihadapi oleh guru di dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelasnya. Kepala sekolah dan setiap guru berdiskusi dan berupaya mencari solusi dari kendala yang dikemukakan. Rapat ini diadakan rutin untuk memantau perkembangan dan keberhasilan. Diharapkan dengan keterbukaan antara kepala sekolah dan guru, dapat memperkuat sinergi dan kerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Unggulan di Tingkat Pendidikan Dasar: Studi Kasus di SD Negeri Sawangan I Magelang Jawa Timur* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33615/>
- Andiawan, I. P. G. S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Kerambitan Selama Pembelajaran Online. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 12(1), 46–52. <https://doi.org/10.36733/jsp.v12i1.3755>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Pendidikan Indonesia : 1008* Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>
- Fadhilah, N. (2021). *Analisis Peran Kepemimpinan Sekolah Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di SD Islam Al Azhar 34 Makassar* (Issue March). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ghunu, N. M. . (2022). The Challenges of Remote Area

- Elementary Schools in Thematic Curriculum Implementation. *International Journal of Instructionstruction*, 15(2), 19–36.
<https://www.e-iji.net/>
- Handayani, S. N. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 277–287.
<https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17207>
- Harahap, A. (2021). Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. In *Disertasi*.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1440>
- Hayom Sasami, R., & Sujarwo. (2018). Implementasi Kebijakan Lima Hari Sekolah Sebagai Sarana Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 6(2), 112–120.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jppfa.v6i2.23628>
- Indaryati, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di SD Muhammadiyah Sapen dan SDN Serayu. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan*, 7(4), 417–428.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/sakp.v7i4.13136>
- Kwon, H. (2017). Delivering Technological Literacy to a Class for Elementary School Pre-Service Teachers in South Korea. *International Journal of Technology and Design Education*, 27(3), 431–444.
<https://doi.org/10.1007/s10798-016-9360-5>
- Maimunah, U. (2018). Implementasi 1009 Kebijakan Standarisasi Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 7(6), 664–676.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/sakp.v7i6.13164>
- Moleong, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (38th ed., Issue March). Remaja Rosda Karya.
-

- <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>
Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>
- Murniviyanti, L., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Drama di Sekolah Dasar. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 20(2), 203–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v20i2.7761>
- Nainggolan, A. W. (2018). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SD Negeri 173198 Pansurna Tolu, Tapanuli Utara* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3573>
- OECD. (2018). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Pearson. (2018). *The Learning Curve: Education Quality Index*. <https://www.pearson.com/content/dam/corporate/global/pearson-dot-com/files/innovation/learning-curve/global-education-index-2018.pdf>
- Priyanto, D., & Dharin, A. (2021). Students Creativity Development Model and Its Implementation in Indonesian Islamic Elementary School. *Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi*, 11(3), 81–87. <https://doi.org/10.14527/pegem.2021.001010>
- Rahmi, A. (2019). Analisis Kebijakan Peraturan Bupati Solok Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Umum Berbasis Pesantren Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok. *Produ: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 10–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3323>
- Rizkitama, F. (2018). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di

- SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 7(3), 263–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/sakp.v7i3.13174>
- Rolos, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VIII(113), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>
- Siddik, F., Silalahi, A. Y., Napitupulu, I. E. Y., Nst, Z. A. A., Bangun, P. N. A., Sagala, H. S. M., & Rossevelt, F. A. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Medan. *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.55904/histeria.v1i1.120>
- Sriah. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Kota Malang* (Vol. 3) [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/44422>
- Sugiarto, A. B. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Mendukung Visi dan Misi Pendidikan di Sekolah Dasar Plus Al-Ishlah Bondowoso. *Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58883/tsaqofah.v4i2.34>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.
- Supriatini, Muhdi, & Yuliejantir 1011 Y. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Kabupaten Demak. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(3), 410–425. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/98126564/287170322-libre.pdf?1675318024=&response-content-disposition=inline;+filename=Implementasi_Kebijakan_Pendidikan_Inklus.pdf&Expires=168138035
-

- 3&Signature=S9koj8INfYWIOGK
mD4tLd3w1Aqyu8sNVF6NCM6f
g-Fy5dHNFz7r4JuN4
- Utari, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Juara Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 175–188.
<https://doi.org/10.21831/sakp.v9i2.17047>
- Vikalista, E., Ratih Rapisa, D., & Putri, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 6(3), 1–12.
<http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/552>
- Wati, E. (2019). Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter di SD Negeri Serayu Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(4), 279–287.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/sakp.v8i4.15870>
- Zakia, H., & Hadiyanto. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen untuk Menjalinkan Kerjasama Dengan Wali Murid. *JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmksp.v5i1.3539>
-